

RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wataala atas tersusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memuat Tujuan, Sasaran Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029 dalam Renstra juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator *output* kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan rencana strategis ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Cibinong, 04 Agustus 2025



**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
KABUPATEN BOGOR**

CECEP IMAM NAGARASID, S.E., M.SI

NIP. 196909221997031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	10
1. Wewenang.....	10
2. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	10
3. Susunan Organisasi.....	11
4. Tugas Unsur Organisasi.....	12
b. Sekretariat.....	12
c. Bidang Pembinaan.....	12
e. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	13
f. Bidang Perlindungan Masyarakat	14
g. Kelompok Jabatan Fungsional	14
h. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja.....	14
5. Tata Kerja.....	14
Gambar Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor	16
a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf.....	16
Grafik Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Yang Menduduki Jabatan Dan Staf, Per-Agustus 2025	16
Grafik Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Pangkat/Golongan Per Juli Tahun 2025	17
C Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	17
Grafik Jumlah Pendidikan ASN Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pendidikan per Juli tahun 2025.....	17
Tabel Data Analisis Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor	18
2. Kondisi Umum Sarana Kerja	19
Tabel Sarana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI.....	34
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.....	40
BAB V PENUTUP.....	58

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Ghjjhgj

1.1.2

1.2 Ghjjh

1.3 Vnhvh

1.4 Ghgc

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan ahapan:

- (1) Persiapan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (3) Penyesuaian Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029 sesuai hasil konsultasi publik RPJMD;
- (4) Penyusunan Rancangan Renstra PD;
- (5) Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
- (6) Verifikasi Rancangan Renstra PD;
- (7) Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (8) Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029;
- (9) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;

(10) Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 serta Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 sampai dengan 2030, sehingga sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan dapat terwujud .

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 - 2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)
 9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16

- Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang

- Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025;
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
46. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;
47. Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan/ Peraturan Bupati;
48. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arahan bagi penyelenggaraan bidang urusan/unsur Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang mendukung pelaksanaan tahapan pertama perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bogor

Tujuan :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD mulai tahun 2025 hingga tahun 2030;
2. Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang urusan/unsur Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *Stakeholders* Satuan Polisi Pamong Praja dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan. Sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2025-2025 sebagai berikut:

Bab I | Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sitematika penulisan.

Bab II | Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini menjelaskan mengenai Gambaran Pelayanan Satpol PP, SDM yang melaksanakan tugas, Kinerja Pelayanan Satpol PP, Kelompok Sasaran Layanan, Permasalahan, dan Isu Strategis.

Bab III | Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bab ini menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran telah bersinergi dengan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2025-2029, dan membahas Strategis, dan Arah Kebijakan.

Bab IV | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini menjelaskan mengenai program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan juga menjelaskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V | PENUTUP

Menguraikan langkah-langkah tindak lanjut pasca ditetapkannya Dokumen Renstra

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.

Kedudukan, Wewenang, Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta bidang perlindungan masyarakat dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Wewenang

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk;

- a. Melakukan tindakan penertiban melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada poin (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- d. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Satuan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Susunan organisasi Satuan, Terdiri atas:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan, membawahi:
 1. Seksi Deteksi Dini ; dan
 2. Seksi Bimbingan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi:
 1. Seksi Pengendalian Operasional; dan
 2. Seksi Ketentraman Masyarakat.

e. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah membawahi:

1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
2. Seksi Penegakan

f. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi:

1. Seksi Data Informasi dan Mobilisasi;
2. Seksi Pelatihan Kelinmasan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Satuan (UPS).

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi.

4. Tugas Unsur Organisasi

a. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan pengelolaan Ketatausahaan Satuan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Pengkoordinasian penyusunan program Satuan;
- b) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data Satuan;
- c) Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- d) Pengelolaan administrasi keuangan;
- e) Pengelolaan situs Web; dan
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Satuan;

c. Bidang Pembinaan

Kepala Bidang Pembinaan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan pembinaan bimbingan masyarakat dan sumber daya aparatur dan deteksi dini. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pembinaan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program bimbingan masyarakat dan sumber daya aparatur dan deteksi dini;

- b) Perumusan kebijakan bimbingan masyarakat dan sumber daya aparatur dan deteksi dini
- c) Pelaksanaan kebijakan dan pengkoordinasian bimbingan masyarakat dan sumber daya aparatur dan deteksi dini
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bimbingan masyarakat dan sumber daya aparatur dan deteksi dini; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan lingkup pengendalian operasional dan ketenteraman masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program pengendalian operasional dan ketentraman masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, kerjasama dan konsultasi ketentraman masyarakat;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketentraman masyarakat; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam penegakan perundang-undangan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penegakan perundang-undangan daerah;
- b) Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penegakan perundang-undangan daerah;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penegakan perundang-undangan daerah;
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam bidang perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program Perlindungan Masyarakat;
- b) penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan Perlindungan Masyarakat
- c) pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian perlindungan Masyarakat
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
- b) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- c) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

h. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja

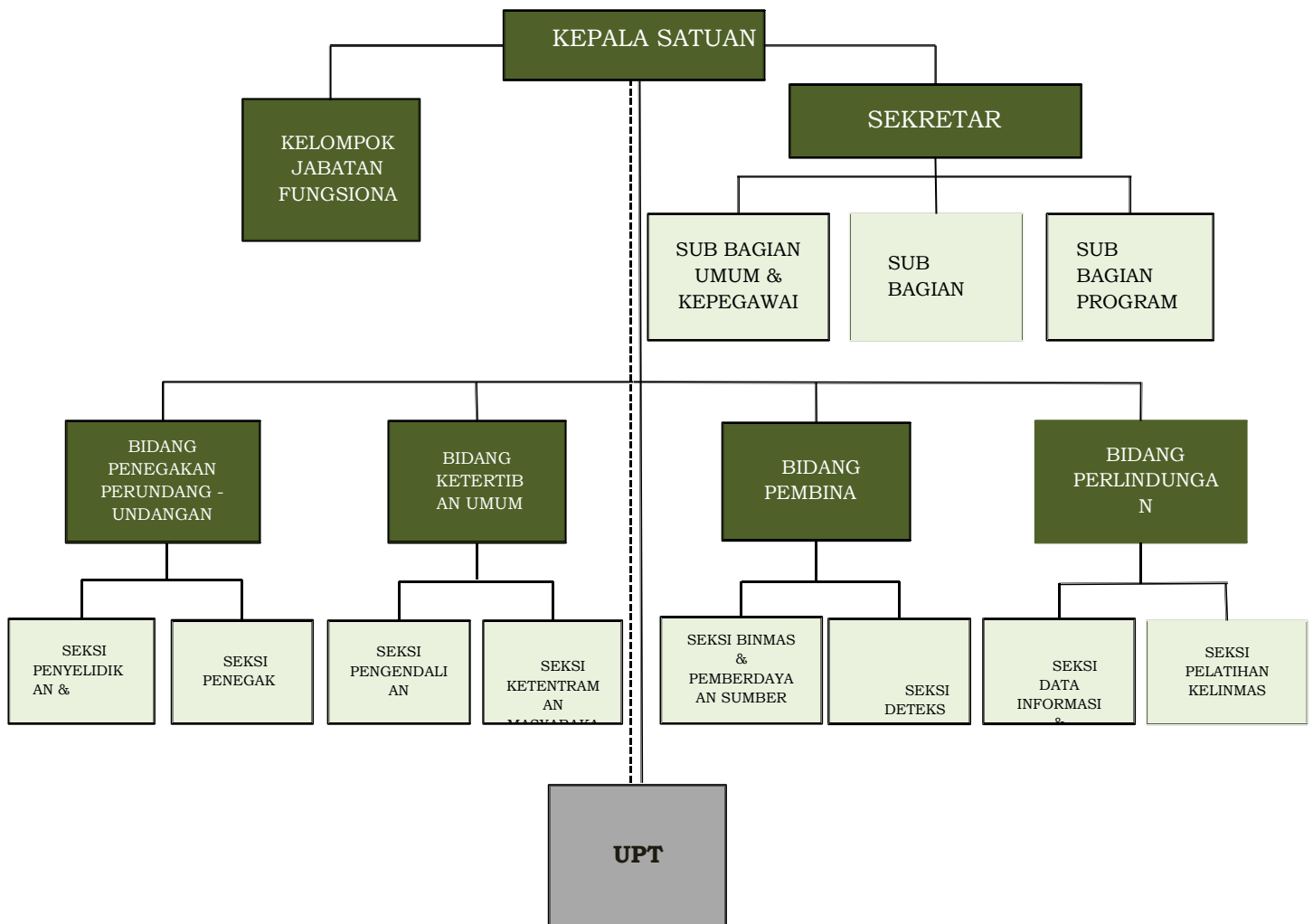
- a) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan kecamatan yang berada diwilayah kabupaten bogor. Susunan organisasi, tugas dan fungsi unit pelaksana satuan polisi pamong praja berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Tata Kerja

- a. Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Satuan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.
- b. Pelaksanaan fungsi Satuan sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan, dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- c. Setiap unsur organisasi di lingkungan Satuan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpifikasi.

- d. Setiap unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Gambar 1 Struktur Organisasi



2.1.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor sampai dengan bulan Juli 2025 adalah sebanyak 670 orang yang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK), Banpol PP, dan Tenaga Kebersihan / OB. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Gambar Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor



Gambar diatas menunjukkan bahwa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 17 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Grafik Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Yang Menduduki Jabatan Dan Staf, Per-Agustus 2025

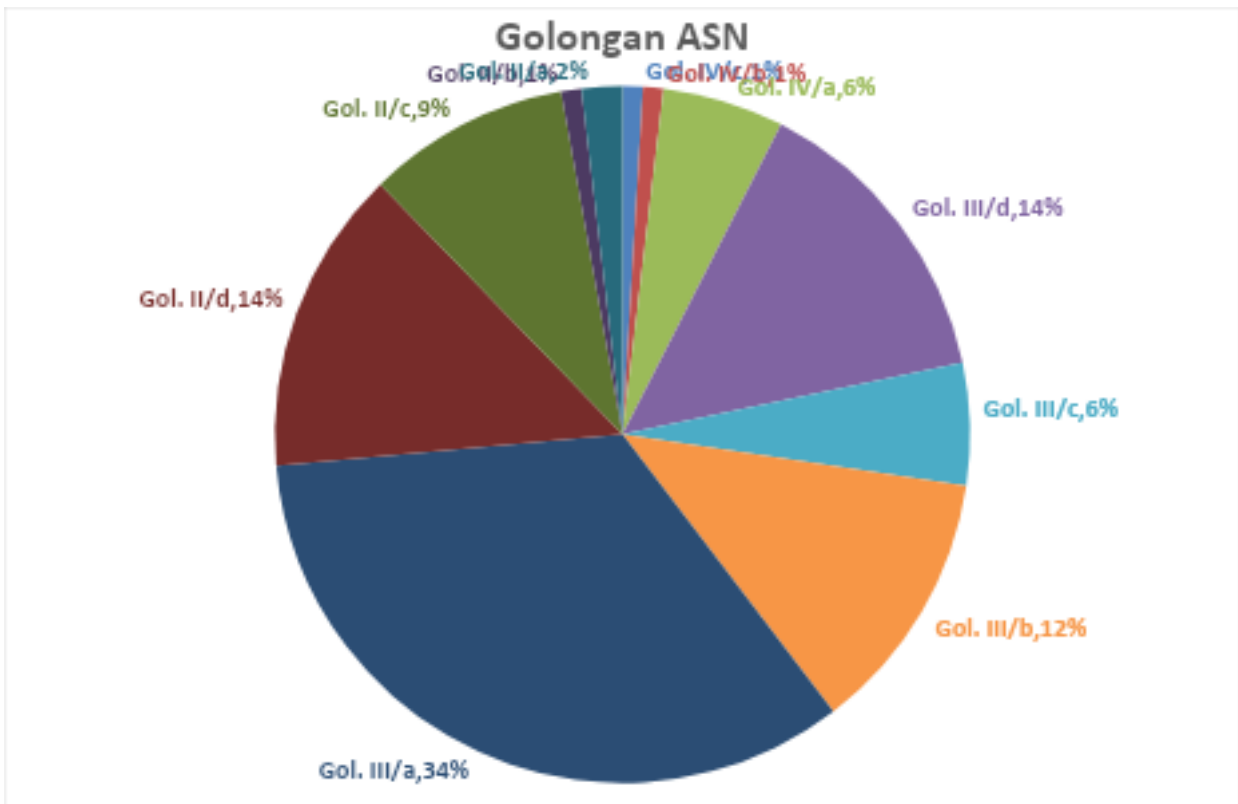


Jumlah Seluruh ASN Satuan Polisi Pamong Praja adalah 141

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat

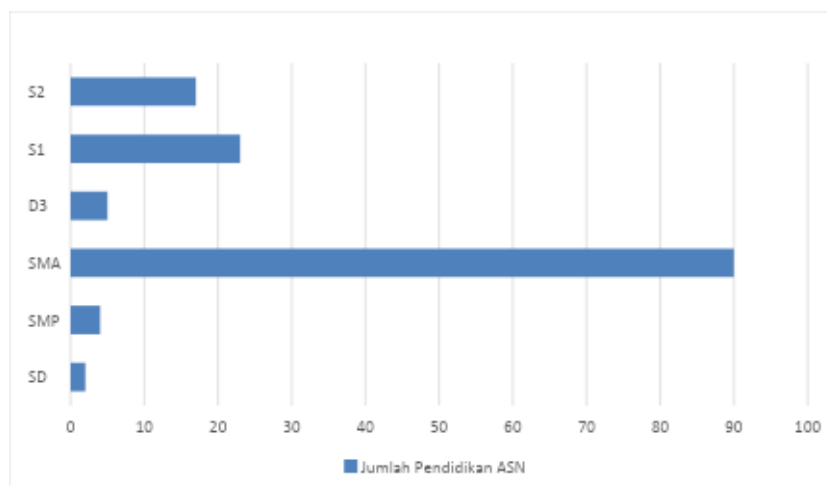
Dari 141 jumlah Pegawai ASN yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 75 pegawai yang berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 8 pegawai, Golongan II sebanyak 58 pegawai. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Grafik Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Pangkat/Golongan Per Juli Tahun 2025



Pamong Praja yang ada, maka status pendidikan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebanyak 90 pegawai, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SD yaitu sebanyak 2 pegawai. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Grafik Jumlah Pendidikan ASN Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pendidikan per Juli tahun 2025.



Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Satuan Polisi Pamong Praja 90 pegawai dengan klasifikasi SLTA/SMK. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja umumnya tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), sehingga fokus pelaksanaan tugas merupakan pelaksanaan tugas operasional berupa pelaksanaan tugas ke lapangan.

Berikut disampaikan tabel Analisis Jabatan di Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor:

Tabel Data Analisis Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor

NO.	JABATAN	BEBAN	KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN
1	KEPALA SATUAN	1	1	0
2	SEKRETARIS	1	1	0
3	SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	2	12	(10)
4	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	12	(4)
5	SUB BAGIAN KEUANGAN	4	7	(3)
6	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	1	0
7	SEKSI PELATIHAN KELINMASAN	5	14	(9)
8	SEKSI DATA INFORMASI DAN MOBILISASI	3	16	(13)
9	KEPALA BIDANG PENEGAKKAN PERUNDANG UNDANGAN DAERAH	1	1	0
10	SEKSI PENEGAKKAN	8	22	(14)
11	SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	5	14	(9)
12	KEPALA BIDANG PEMBINAAN	1	1	0
13	SEKSI DETEKSI DINI	7	23	(16)
14	SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA APARATUR	10	19	(10)
15	KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM	1	1	0
16	SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL	50	149	(97)

NO.	JABATAN	BEBAN	KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN
17	SEKSI KETENTRAMAN MASYARAKAT	9	33	(25)
TOTAL		117	327	(210)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Total beban 117 sedangkan untuk total kebutuhan pegawai sejumlah 327 maka dapat diketahui bahwa Jumlah kebutuhan PNS Satuan Polisi Pamong Praja masih memerlukan 210 PNS. Hal ini menggambarkan kondisi kebutuhan pegawai yang belum ideal.

2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Sarana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Tanah	3000	M2
2	Gedung	2598	M2
3	Listrik	60000	Watt
4	Air	1	Jaringan
5	Telpon	1	P4bx(Jaringan)
6	Area Parkir	1	Area
7	Ruang Rapat	1	Ruang
8	Aula	1	Ruang
9	Kendaraan Roda 6	6	Unit
10	Kendaraan Roda 4	24	Unit
11	Kendaraan Roda 2	50	Unit
12	Meja Rapat	21	Unit
13	Ac	30	Unit
14	Komputer Pc	51	Unit
15	Laptop	38	Unit
16	Meja Kerja	88	Unit
17	Meja Rapat	114	
18	Kursi Kerja	154	Unit
19	Filling Kabinet	32	Unit
20	Rak Arsip	45	Unit
21	Proyektor	2	Unit

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
22	Lemari Arsip	21	Unit
23	Alat Phh	132	Unit
24	Kamera Digital	6	Unit
25	Brankas	1	Unit
26	Sound System	3	Unit
27	Printer	38	Unit
28	Loker	1	Unit
29	Megaphone	2	Unit
30	Handy Talky(HT)	58	Unit

2.1.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja satuan polisi pamong praja yang terkait dengan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Target tujuan satuan polisi pamong praja tahun 2024 yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan trantibumlinmas dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Tramtibum dan Satlinmas adalah 75 poin dengan kategori baik telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar 78 poin atau tercapai 100 %.
2. Target sasaran satuan polisi pamong praja tahun 2024 yaitu Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada dengan indikator Indeks Penegakan Perda dan Perkada adalah 75 poin dengan katagori baik telah terealisasi pada tahun 2024 sebesar 75 poin atau tercapai 100%.
3. Target capaian program tahun 2024 satuan polisi pamong praja yaitu Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan telah terealisasi sebesar 100% dari target kinerja yang disusun sebesar 100%.
4. Target capaian program tahun 2024 satuan polisi pamong praja yaitu Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas yang dapat diselesaikan telah terealisasi sebesar 72 % dari target kinerja yang disusun sebesar 100%
5. Target capaian program tahun 2024 satuan polisi pamong praja yaitu Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP diselesaikan telah terealisasi sebesar 100 % dari target kinerja yang disusun sebesar 100 %
6. Target capaian program tahun 2024 satuan polisi pamong praja yaitu Persentase Penegakan Perda dan Perkada diselesaikan telah

teralisasi sebesar 100 % dari target kinerja yang disusun sebesar 100 %

7. Target capaian program tahun 2024 satuan polisi pamong praja yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah telah terealisasi sebesar 76,7 poin dari target kinerja yang disusun sebesar 76,7 poin

Capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan target Renstra tahun 2025 - 2029 adalah sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Bogor Tahun 2020-2024

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 10/5 *100	16 = 11/6 *100	17 = 12/7 *100	18 = 13/8 *100	19 = 14/9 *100
	IKU																	
	TUJUAN																	
	Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penanganan gangguan trantibum, Penegakan Perda/Perbu dan Peningkatan Petugas Linmas	Persen	69.58				69.58						100				
	TUJUAN																	
	Kabupaten Bogor yang Tertib dan Nyaman	Tingkat Penyelesaian Gangguan Trantibum	Persen		100	100	100			100	100	100			100	100	100	
	TUJUAN																	
	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum	Persen					87					87					100
	SASARAN																	
	Terwujudnya Penegakan Perda dan Perbup	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100					100					100				
	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100					100					100				
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	108.75					108.75					100				
	SASARAN																	
	Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen		100	100	100			100	100	100			100	100	100	
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen		100	100	100			100	100	100			100	100	100	
		Persentase Pemberdayaan Linmas	Persen		100	100	100			100	100	100			100	100	100	

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	SASARAN																	
	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen					100					100					100
	IKK																	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100					100					100				
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Persen	100					100					100				
		Cakupan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	100					100					100				
		Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	108.75					108.75					100				
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen		100	100	100			100	100	100			100	100	100	
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen					100					100					100
		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas	Persen					72					72					100
		Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP	Persen					100					100					100
		Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen					100					100					100

Pengukuran kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Pada tahun 2024, Capaian indikator tujuan Satuan Polisi Pamong Praja mencapai poin 87 dari target poin 87 yang ditetapkan dan secara keseluruhan target kinerja Satpol PP telah tercapai dengan capaian kinerja rata-rata 100%, dengan uraian capaian sasaran dan indikatornya adalah Penegakan Perda dan Perkada dengan indikator kinerja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan terealisasi 100% dari target 100%. Alokasi anggaran Satpol PP periode 2020-2024 didukung oleh APBD Kabupaten Bogor, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada, sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		43,538,392,671	50,197,722,541	50,165,431,452	68,283,853,278		43,197,819,739	48,876,679,340	49,359,960,889	67,018,478,948						18,004,536,344	80	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		22,515,126,782	44,245,380,637	41,392,936,616	49,951,508,108		22,289,935,063	43,040,656,342	40,742,243,815	49,001,506,789		99.00	97.28	98.43	98.10	-	9,242,561,622	80
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		314,048,465	536,305,772	560,947,122	939,396,318		312,215,228	486,302,468	539,547,396	857,631,852		99.42	90.68	96.19	91.30	20,724,736	83	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		15,717,700	49,040,000	23,063,473	149,698,600		15,717,700	45,778,300	18,106,050	123,187,000		100.00	93.35	78.51	82.29	257,430,280	80	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		150,666,715	16,853,300	21,989,250	21,678,832		148,915,928	9,883,300	19,903,100	18,588,500		98.84	58.64	90.51	85.74	247,430,234	80	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		6,636,700	11,039,550	26,885,342	24,713,225		6,628,750	4,239,550	25,897,500	24,251,000		99.88	38.40	96.33	98.13	20,069,877,355	80	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		11,570,900	14,623,350	21,851,250	40,703,475		11,536,950	12,099,350	19,534,900	39,682,900		99.71	82.74	89.40	97.49	798,359,305	80	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		7,829,400	17,777,050	21,108,900	38,747,025		7,829,400	17,777,050	17,810,600	38,145,000		100.00	100.00	84.37	98.45	145,250,595	80	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8,167,550	63,275,350	94,361,975	195,796,700		8,167,150	62,525,350	87,506,550	179,425,500		100.00	98.81	92.73	91.64	17,382,845,660	81	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		113,459,500	363,697,172	351,686,932	468,058,461		113,419,350	333,999,568	350,788,696	434,351,952		99.96	91.83	99.74	92.80	1,599,703,308	79	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		18,998,626,582	19,989,492,133	19,411,121,619	20,088,298,032		18,795,617,900	19,182,194,847	18,900,251,559	19,832,920,323		98.93	95.96	97.37	98.98	-	3,348,811,606	80
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		18,925,389,832	19,620,301,197	19,069,403,053	19,654,515,698		18,722,384,150	18,820,374,705	18,565,532,393	19,453,916,339		98.93	95.92	97.36	98.98	-	3,800,993,140	80
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		18,560,000	141,206,536	175,006,508	298,160,684		18,560,000	136,335,842	173,215,608	294,353,084		100.00	96.55	98.98	98.72	292,278,863	80	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12,000,000	23,195,100	52,969,708	15,552,725		11,999,900	23,115,100	51,768,608	15,496,800		100.00	99.66	97.73	99.64	173,916,455	81	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		10,000,000	124,957,650	27,800,000	16,832,825		10,000,000	124,013,650	27,000,000	16,345,600		100.00	99.24	97.12	97.11	785,990,435	99	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		5,000,000					4,997,250					99.95				296,800,000	80	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		22,676,750	68,831,900	75,475,800	45,599,825		22,676,600	67,395,800	73,283,400	45,268,200		100.00	97.91	97.10	99.27	27,260,035	80	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		5,000,000	10,999,750	10,466,550	7,636,275		5,000,000	10,959,750	9,451,550	7,540,300		100.00	99.64	90.30	98.74	111,959,745	84	

RENSTRA 2025 – 2029 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	-	-	-	51,000,000	1,323,623,865	-	-	-	50,660,000	981,004,675				99.33	74.12	-	202,250,773	83
Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	-	-	1,233,802,650	-	-	-	-	892,440,000					72.33	-	33,455,470	80
Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	-	-	-	51,000,000	89,821,215	-	-	-	50,660,000	88,564,675				99.33	98.60	-	9,372,577,757	80
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,312,981,100	1,518,267,900	1,475,937,325	2,515,644,600	-	1,344,217,200	1,511,590,361	1,454,709,681	2,464,938,365	-	102.38	99.56	98.56	97.98	-	323,128,920	82	
Penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor	6,194,500	6,306,600	15,672,000	11,050,000	-	6,194,500	6,306,600	12,842,000	9,614,000	-	100.00	100.00	81.94	87.00	-	2,220,000	80	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,220,100	112,048,550	117,445,425	129,145,800	-	89,960,000	110,459,500	113,267,550	126,421,190	-	99.71	98.58	96.44	97.89	-	525,910,840	80	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	780,991,500	914,645,750	844,827,900	1,150,284,800	-	779,471,500	913,826,761	832,058,200	1,136,428,564	-	99.81	99.91	98.49	98.80	-	74,841,960	80	
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	435,575,000	385,267,000	454,092,000	1,225,164,000	-	412,788,200	382,147,500	452,975,931	1,192,474,611	-	94.77	99.19	99.75	97.33	-	328,716,200	100	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	56,000,000	100,000,000	43,900,000	-	-	55,803,000	98,850,000	43,566,000	-	-	99.65	98.85	99.24	-	-	34,675,000	78	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	533,341,013	2,217,340,220	375,808,575	4,516,415,905	-	508,723,500	2,107,540,350	368,645,000	4,426,523,000	-	95.38	95.05	98.09	98.01	-	3,971,891,819	80	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	2,851,267,500	-	-	-	-	2,774,543,000	-	-	-	-	97.31	-	366,285,500	79	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151,926,050	503,180,370	375,808,575	1,665,148,405	-	148,754,000	484,772,000	368,645,000	1,651,980,000	-	97.91	96.34	98.09	99.21	-	289,159,681	99	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	18,315,000	-	-	-	-	18,241,000	-	-	-	-	99.60	-	-	-	-	84,000,000	100	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	363,099,963	1,714,159,850	-	-	-	341,728,500	1,622,768,350	-	-	-	94.11	94.67	-	-	-	394,000,000	80	
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	512,356,300	18,699,601,212	18,471,795,975	19,536,661,388	-	495,245,301	18,481,745,440	18,424,564,225	19,440,509,019	-	96.66	98.83	99.74	99.51	-	3,292,732,278	81	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223,934,400	304,286,550	305,586,832	305,790,360	-	212,652,165	269,020,112	296,650,234	281,480,268	-	94.96	88.41	97.08	92.05	-	22,108,072	79	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288,421,900	18,395,314,662	18,166,209,143	19,230,871,028	-	282,593,136	18,212,725,328	18,127,913,991	19,159,028,751	-	97.98	99.01	99.79	99.63	-	3,782,774,206	81	
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	843,773,322	1,284,373,400	1,046,326,000	1,081,468,000	-	833,915,934	1,271,282,876	1,003,865,954	997,979,555	-	98.83	98.98	95.94	92.28	-	219,796,400	83	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34,680,000	46,383,400	58,350,000	57,600,000	-	34,655,600	45,903,300	41,173,700	47,037,700	-	99.93	98.96	70.56	81.66	-	397,317,000	82	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	438,000,000	870,000,000	631,500,000	661,180,000	-	434,440,762	866,304,503	608,539,779	589,801,250	-	99.19	99.58	96.36	89.20	-	56,478,000	80	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76,300,000	100,650,000	73,100,000	105,300,000	-	73,653,500	100,289,423	71,726,000	104,540,000	-	96.53	99.64	98.12	99.28	-	142,395,000	78	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	294,793,322	267,340,000	283,376,000	257,388,000	-	291,166,072	258,785,650	282,426,475	256,600,605	-	98.77	96.80	99.66	99.69	-	36,077,600	77	

RENSTRA 2025 – 2029 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		21,023,265,889	5,952,341,904	8,772,494,836	18,332,345,170		20,907,884,676	5,836,022,998	8,617,717,074	18,016,972,159		99.45	98.05	98.24	98.28	-	3,618,469,034	80
Penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota		20,455,758,877	5,104,363,356	7,092,241,585	17,053,114,329		20,342,040,412	5,064,609,742	7,036,203,336	16,778,930,087		99.44	99.22	99.21	98.39	-	3,395,632,866	77
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		369,091,774	548,956,868	560,563,791	640,218,853		367,791,756	546,844,856	558,366,080	626,119,493		99.65	99.62	99.61	97.80	-	104,743,771	78
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		1,003,671,819	1,991,843,004	2,466,982,404	4,338,064,299		999,812,648	1,990,667,788	2,465,545,897	4,331,477,870		99.62	99.94	99.94	99.85	-	806,203,860	78
Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota		475,456,682	692,128,498	562,232,716	2,924,872,110		466,710,003	682,684,598	560,336,116	2,816,901,624		98.16	98.64	99.66	96.31	-	497,499,422	79
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum		169,254,650	687,358,750	409,318,150	1,534,991,650		167,017,250	674,271,650	405,268,600	1,510,445,180	4,040	98.68	98.10	99.01	98.40	-	181,998,330	80
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		639,239,223	682,641,436	1,381,849,524	1,825,372,074		634,457,152	672,298,850	1,356,968,143	1,755,081,320		99.25	98.48	98.20	96.15	-	365,074,415	- 20
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		17,799,044,729	501,434,800	1,711,295,000	5,789,595,343		17,706,251,603	497,842,000	1,689,718,500	5,738,904,600		99.48	99.28	98.74	99.12	-	1,157,919,069	- 19
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota		567,507,012	847,978,548	1,680,253,251	1,279,230,841		565,844,264	771,413,256	1,581,513,738	1,238,042,072		99.71	90.97	94.12	96.78	-	255,846,168	- 20
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota				324,009,100	295,113,680				321,027,150	289,168,700				99.08	97.99	-	59,022,736	- 20
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota		371,262,972	500,863,794	556,692,970	481,222,452		370,756,860	439,072,298	550,928,493	469,931,452		99.86	87.66	98.96	97.65	-	96,244,490	- 19
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota		196,244,040	347,114,754	799,551,181	502,894,709		195,087,404	332,340,958	709,558,095	478,941,920		99.41	95.74	88.74	95.24	-	100,578,942	-

RENSTRA 2025 – 2029 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH	9,390,542,000					9,347,894,476					99.55					-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180,000,000					178,542,631					99.19					-	-
Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang Undangan	4,430,000					4,430,000					100.00					-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	551,740,000					551,558,697					99.97					-	-
Penyediaan Makanan dan Minuman	155,215,000					153,654,751					98.99					-	-
Pengelolaan Kebersihan Kantor	573,749,000					572,987,427					99.87					-	-
Pengelolaan Legalitas Kendaraan	34,675,000					33,974,853					97.98					-	-
Dinas/ Operasional/ Jabatan Pengadaan Kendaraan	4,875,175,000					4,859,657,128					99.68					-	-
Dinas/ Operasional/ Jabatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	203,968,000					201,598,742					98.84					-	-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	43,870,000					43,598,741					99.38					-	-
Pengadaan Perlengkapan Kantor	84,000,000					83,682,487					99.62					-	-
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Utama Kantor	394,000,000					392,548,714					99.63					-	-
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan	614,600,000					613,557,483					99.83					-	-
Dinas/ Operasional/ Jabatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	39,050,000					38,516,725					98.63					-	-
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	63,400,000					63,246,887					99.76					-	-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	436,090,000					434,769,871					99.70					-	-
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	408,837,000					407,578,945					99.69					-	-
Pengadaan Pakaian Dinas	188,714,000					187,845,628					99.54					-	-
Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	163,455,000					160,347,856					98.10					-	-
Penyusunan Pelaporan Keuangan	15,400,000					14,854,645					96.46					-	-
Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	48,000,000					47,729,987					99.44					-	-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	14,990,000					14,465,897					96.50					-	-
Penyusunan Perencanaan Anggaran	23,300,000					22,754,879					97.66					-	-
Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	61,409,000					59,764,521					97.32					-	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	87,475,000					86,656,981					99.06					-	-
Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	125,000,000					124,000,000					99.20					-	-

RENSTRA 2025 – 2029 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENEKAMAN PERATURAN DAERAH	747,740,000					736,832,137					98.54					-	-
Penyelenggaraan Penertiban Non Yustisi	208,604,000					206,587,784					99.03					-	-
Penyelenggaraan Penertiban Objek Pelanggaran Yang Bukan Menjadi Kewenangan Daerah	287,370,000					280,489,875					97.61					-	-
Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah	251,766,000					249,754,478					99.20					-	-
PROGRAM PENGELOMPOKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20,074,820,000					20,041,577,493					99.83					-	-
Pengendalian Keamanan Lingkungan	806,500,000					804,469,987					99.75					-	-
Patroli Ketertiban Umum	153,000,000					150,875,000					98.61					-	-
Pengadaan Dukungan Teknis Penyelenggaraan Tramtibum	17,422,005,000					17,420,587,265					99.99					-	-
Penyelenggaraan Penertiban Dalam Rangka Penegakan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	1,693,315,000					1,665,645,241					98.37					-	-
PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	658,848,000					656,669,411					99.67					-	-
Pengelolaan Data Keinmasan	129,910,000					128,984,745					99.29					-	-
Pelatihan Keinmasan Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	351,911,000					350,789,254					99.68					-	-
Mobilisasi Anggota Linmas Dalam Membantu Penyelenggaraan Tramtibum	177,027,000					176,895,412					99.93					-	-
PROGRAM PEMBINAAN SUMBER DAYA APARATUR DAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN TRAMTIBUM	789,357,000					784,179,942					99.34					-	-
Pengelolaan Data / Informasi Potensi Gangguan Tramtibum	296,800,000					296,548,792					99.92					-	-
Penyelenggaraan Penegakan Disiplin Aparatur Daerah	36,380,000					36,125,456					99.30					-	-
Penyelenggaraan HUT POLPP DAN LINMAS	113,487,000					111,873,654					98.58					-	-
Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Aparatur Sat Pol PP	62,474,000					60,697,521					97.16					-	-
Pembinaan Tramtibum Kepada Masyarakat	280,216,000					278,934,519					99.54					-	-

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah bahwa dinamika pembangunan daerah serta dinamika masyarakat yang bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap peraturan dan kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Dalam rangka menyusun perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran, hal mendasar yang wajib diidentifikasi, dirumuskan, dan dianalisis oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah apa saja serta sejauh mana permasalahan yang belum terselesaikan hingga akhir periode perencanaan sebelumnya. Identifikasi permasalahan ini menjadi dasar dalam penentuan isu strategis yang akan ditangani hingga akhir periode perencanaan.

Dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, permasalahan dalam aspek pelayanan umum dijabarkan berdasarkan urusan, bidang urusan, dan unsur yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor. Untuk urusan wajib pelayanan dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja, tercatat bahwa penanganan gangguan trantibum, Perda, dan Perkada masih belum optimal. Selain itu, permasalahan kekinian yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah penataan pedagang kaki lima (PKL) di fasilitas umum yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bogor serta peredaran minuman beralkohol yang hingga kini belum memiliki aturan daerah sebagai landasan hukum penindakan, serta proses perubahan Peraturan Daerah terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang sedang berjalan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan isu strategis yaitu efektivitas penegakan hukum peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada, serta perlindungan masyarakat. Adapun uraian permasalahan yang telah disusun dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

**KERTAS KERJA PERUMUSAN PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA**

NO	URAIAN	PERMASALAHAN
1	Identifikasi berdasarkan pencapaian kinerja (IKU, IKK)	Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berkaitan dengan Indeks Trantibumlinmas masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini disebabkan oleh ketentuan perhitungan indeks sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang hingga saat ini belum sepenuhnya dipahami.
2	Identifikasi berdasarkan hasil analisis KLHS	1. Keberadaan Bangunan liar atau tidak memiliki izin yang berdiri diatas wilayah konservasi seperti di wilayah Puncak yang harus dikaji kembali karena memberikan dampak buruk bagi lingkungan
		2. Keberadaan Galian C di wilayah Kabupaten Bogor yang banyak merusak lingkungan yang harus diawasi secara berkala oleh <i>stakeholder</i> terkait.
3	Identifikasi berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi oleh PD	1. Belum optimalnya pengembangan kapasitas aparatur Satpol PP dan Satlinmas seperti kekurangan tenaga aparatur PPNS
		2. Masih banyak terjadi pelanggaran terhadap Perda dan Perkada
		3. Belum optimalnya sarana dan prasarana Satpol PP sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		4. Diperlukan perubahan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum untuk disesuaikan dengan perkembangan pelanggaran yang terjadi

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap permasalahan pembangunan Kabupaten Bogor, yang meliputi 1) aspek geografi dan demografi; 2) aspek kesejahteraan masyarakat; 3) aspek daya saing daerah; dan 4) aspek pelayanan umum, serta penelaahan terhadap isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Jawa Barat, serta isu strategis wilayah perbatasan, maka ditetapkan empat rancangan isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025 - 2029, yaitu :

1. Pelayanan Publik
2. Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Daya Saing Daerah
4. Pembangunan Berkelanjutan

Isu Strategis Kabupaten Bogor yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja pada rencana pembangunan daerah tahun 2025 - 2029 adalah Pelayanan Publik yang menjadi bagian tidak terpisahkan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yang meliputi peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Penentuan Isu Strategis dilakukan agar dapat diantisipasi dan disikapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat ditindak lanjuti menjadi kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian Isu Strategis yang telah ditentukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Rencana Strategis 2025 - 2029 adalah Efektivitas penegakan hukum peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada, serta Perlindungan Masyarakat.

Tabel 2.4

KERTAS KERJA PERUMUSAN ISU STRATEGIS PERANG KAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Bogor	1. Keberadaan Bangunan liar atau tidak memiliki izin yang berdiri diatas wilayah konservasi seperti di wilayah Puncak yang harus dikaji kembali karena memberikan dampak buruk bagi lingkungan	Pelanggaran Perda dan Perkada yang merusak lingkungan (Bangli tanpa izin, Galian C tanpa izin, dan pelanggaran lingkungan lainnya)	Geopolitik dan Geoekonomi	Perubahan Iklim, Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan serta Ketahanan Bencana	Keberlanjutan Penataan Ruang	Efektivitas penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat
	2. Keberadaan Galian C di wilayah Kabupaten Bogor yang banyak merusak lingkungan yang harus diawasi secara berkala oleh <i>stakeholder</i> terkait.					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

3.1 Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), diperlukan kerangka yang jelas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, terutama terkait dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam **RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029**.

Tujuan merupakan kondisi yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dari sasaran pembangunan yang ditetapkan oleh Kabupaten Bogor, kemudian diturunkan menjadi tujuan Renstra Satpol PP Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029, yaitu **“Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibumlinmas.”**

Sejalan dengan hal tersebut, diterbitkannya **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**, menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029. Indeks Penyelenggaraan Tramtibum dan Satlinmas ditetapkan sebagai indikator pencapaian tujuan Satpol PP.

Indeks ini berfungsi untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tata kelola penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibum dan satlinmas) di Kabupaten Bogor.

3.2 Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Dengan kata lain, sasaran adalah bentuk spesifik dari tujuan.

Sasaran yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.4 – 084 Tahun 2023 Tentang Instrumen Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun

waktu 2025 - 2029 adalah Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada dengan indikator Indeks Penegakan Perda dan Perkada. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor sesuai dengan Sasaran Kabupaten Bogor yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan daerah.

Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2029**

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan trantibumlinmas		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (sub urusan trantibum dan linmas)	Poin	75	76	77	78	79	80	
Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan daerah		Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Poin	75	76	77	78	79	80	

3.3 Arah Kebijakan Satpol PP dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025- 2029

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, arah kebijakan dilakukan untuk menindaklanjuti strategi secara teknis, serta terealisasi dalam kegiatan dan sub kegiatan. Arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dilakukan pada periode Renstra 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menjamin Pemerintahan yang Bersih dan Tanpa KKN;
2. Peningkatan penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat;
3. Peningkatan capaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi lingkup Satpol PP.

Adapun Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor disajikan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.2

**PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PENAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2026-2030**

2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Melaksanakan Pelatihan dan Pembinaan terhadap Aparatur Satpol PP dan Satlinmas	Melaksanakan Pelatihan dan Pembinaan terhadap Aparatur Satpol PP dan Satlinmas	Melaksanakan Pelatihan dan Pembinaan terhadap Aparatur Satpol PP dan Satlinmas	Melaksanakan Pelatihan dan Pembinaan terhadap Aparatur Satpol PP dan Satlinmas	Melaksanakan Pelatihan dan Pembinaan terhadap Aparatur Satpol PP dan Satlinmas	Melaksanakan Pelatihan dan Pembinaan terhadap Aparatur Satpol PP dan Satlinmas
Mengirim Aparatur Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS	Mengirim Aparatur Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS	Mengirim Aparatur Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS	Mengirim Aparatur Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS	Mengirim Aparatur Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS	Mengirim Aparatur Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS
Melaksanakan Penegakan dan Penertiban terhadap Pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum	Melaksanakan Penegakan dan Penertiban terhadap Pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum	Melaksanakan Penegakan dan Penertiban terhadap Pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum	Melaksanakan Penegakan dan Penertiban terhadap Pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum	Melaksanakan Penegakan dan Penertiban terhadap Pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum	Melaksanakan Penegakan dan Penertiban terhadap Pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum
Memperkuat Pengawasan terhadap pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum	Memperkuat Pengawasan terhadap pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum	Memperkuat Pengawasan terhadap pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum	Memperkuat Pengawasan terhadap pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum	Memperkuat Pengawasan terhadap pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum	Memperkuat Pengawasan terhadap pelanggaran Perda, Perkada, dan Trantibum
Melaksanakan Sosialisasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat	Melaksanakan Sosialisasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat	Melaksanakan Sosialisasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat	Melaksanakan Sosialisasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat	Melaksanakan Sosialisasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat	Melaksanakan Sosialisasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat
Melaksanakan Penyelenggaraan Gerakan Disiplin Daerah	Melaksanakan Penyelenggaraan Gerakan Disiplin Daerah	Melaksanakan Penyelenggaraan Gerakan Disiplin Daerah	Melaksanakan Penyelenggaraan Gerakan Disiplin Daerah	Melaksanakan Penyelenggaraan Gerakan Disiplin Daerah	Melaksanakan Penyelenggaraan Gerakan Disiplin Daerah
Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Pusat (kementerian) dengan pemerintah Daerah	Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Pusat (kementerian) dengan pemerintah Daerah	Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Pusat (kementerian) dengan pemerintah Daerah	Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Pusat (kementerian) dengan pemerintah Daerah	Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Pusat (kementerian) dengan pemerintah Daerah	Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah Pusat (kementerian) dengan pemerintah Daerah
Pengembangan data dan informasi berbasis elektronik	Pengembangan data dan informasi berbasis elektronik	Pengembangan data dan informasi berbasis elektronik	Pengembangan data dan informasi berbasis elektronik	Pengembangan data dan informasi berbasis elektronik	Pengembangan data dan informasi berbasis elektronik
Meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi setiap tahun melalui pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP	Meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi setiap tahun melalui pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP	Meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi setiap tahun melalui pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP	Meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi setiap tahun melalui pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP	Meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi setiap tahun melalui pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP	Meningkatkan pencapaian sasaran strategis dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi setiap tahun melalui pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP

3.4 Strategi Satpol PP dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi dilakukan untuk mendukung sasaran dan tujuan, serta terealisasi dalam rencana program yang akan dilaksanakan. Penentuan Strategi Merujuk pada tujuan dan sasaran maka rumusan strategi pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 - 2029 adalah “Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda/perkada dan sosialisasi kepada masyarakat serta penguatan perlindungan masyarakat”

Tabel 3.3
ARAH KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
1	-	Menyempurnakan Tata Kelola Pemerintahan dengan Menjamin Pemerintahan yang Bersih dan Tanpa KKN	Meningkatkan penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	-

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/Kegiatan Lokalitas Perangkat Daerah (PD), Program/Kegiatan Lintas PD, serta Program/Kegiatan Kewilayahan.

- Program/Kegiatan Lintas PD merupakan sekumpulan rencana kerja yang melibatkan beberapa perangkat daerah secara terintegrasi.
- Program/Kegiatan Kewilayahan maupun Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan perangkat daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, maupun kawasan.

Adapun program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Bogor yang akan dilaksanakan dalam periode 2025–2029 terdiri atas 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan, dengan indikator program dan kegiatan yang ingin dicapai dirumuskan sebagai berikut:

1. Program Utama (Prioritas)

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian program dan indikator yaitu:

- Tercapainya penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku dengan indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan;
- Tercapainya kapasitas anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) dengan indikator Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas;
- Tercapainya kapasitas anggota Satpol PP dengan indikator Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP;
- Tercapainya penanganan penegakan perda dan perkara sesuai SOP yang berlaku dengan indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada.

2. Program Penunjang

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah. Selengkapnya rencana program dan kegiatan serta indikator programnya yang disertai pendanaannya dijabarkan pada tabel 4.1

Tabel 4.1

**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA**

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, dan terintegrasi	Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan trantibumlinmas	Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tertanganinya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku	Meningkatnya Penanganan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan SOP yang berlaku	Indeks Pelayanan Publik		
			Meningkatnya kapasitas anggota Perlindungan masyarakat	Standar peningkatan kapasitas anggota Perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (sub urusan trantibum dan linmas)		
			Meningkatnya kapasitas anggota Satpol PP	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP	Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
			Tegaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP yang berlaku	Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada sesuai dengan SOP yang berlaku	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		
					Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas		
					Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP		
					Persentase Penegakan Perda dan Perkada		
					Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		
					Persentase anggota satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya		
					Persentase Anggota Sat Pol PP yang telah memperoleh Pelatihan dan Pembinaan		
					Persentase pelanggaran perda dan perkada yang tertangani sesuai SOP		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
					Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
					Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
					Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelompokan barang milik daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KE TERANGAN
					Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Persentase terpuhinya jasa pelayanan administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Perangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KE TERANGAN
					Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas		
					Persentase Pemberdayaan Anggota Setpol pp		
					Persentase Penegakan Perda dan Perkada		
					Persentase penanganan gangguan ketertiban dan ketertiban umum	Penanganan gangguan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Prevention Gangguan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Penindakan atas Gangguan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
					Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban dan Ketertiban Umum	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Terselesainya penanganan pelanggaran perda dan perkada sesuai SOP yang berlaku	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah sesuai SOP	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	

Penjabaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan guna mendukung tujuan, sasaran, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2025-2030

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				67,018,478,048		52,642,308,568		48,982,854,957		60,978,284,424		68,074,118,498		74,285,592,938		86,834,167,579	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			49,001,505,789		44,153,207,185		44,671,747,034		49,947,810,888		55,743,380,687		60,849,631,508		71,779,458,871	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	49,001,505,789	BB	44,153,207,185	BB	44,671,747,034	BB	49,947,810,888	BB	55,743,380,687	BB	60,849,631,508	BB	71,779,458,871	
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100	857,631,852	100	531,752,098	100	559,484,271		1,040,883,205	100	1,144,971,525	100	1,259,468,678	100	1,485,415,546	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	123,187,000	9	52,121,000	7	56,446,000	7	112,333,100	7	123,566,410	7	135,923,051	7	149,515,356	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	18,588,500	1	55,825,375	1	9,000,846	1	61,407,913	1	67,548,704	1	74,303,574	1	181,733,932	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	24,251,000	1	31,114,223	1	7,707,375	1	34,225,645	1	37,648,210	1	41,413,031	1	45,554,334	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	2	39,682,900	2	42,738,450	2	11,238,875	2	102,012,295	2	112,213,525	2	123,434,877	2	135,778,365	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	2	38,145,000	2	35,283,250	2	11,144,650	2	38,811,575	2	42,692,733	2	46,962,006	2	51,658,206	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	179,425,500	5	58,521,850	1	57,187,400	1	64,374,035	1	70,811,439	1	77,892,582	1	85,681,841	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	434,351,952	1	203,553,100	1	300,357,775	1	514,864,307	1	566,350,738	1	622,985,812	1	685,284,393	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	-	1	52,594,850	1	106,401,350	1	112,854,335	1	124,139,769	1	136,553,745	1	150,209,120	

RENSTRA 2025 – 2029 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	100	19,832,919,323	100	19,966,364,482	100	21,386,182,833	100	22,126,237,080	100	24,338,860,788	100	26,772,746,867	100	29,450,021,554	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	117	19,453,915,339	112	19,686,959,732	125	21,110,796,358	125	21,655,655,705	125	23,821,221,276	125	26,203,343,403	125	28,823,677,744	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	294,353,084	12	126,960,200	12	181,887,950	12	277,312,365	12	305,043,602	12	335,547,962	12	369,102,758	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	15,496,800	12	22,210,975	12	9,917,500	12	24,432,073	12	26,875,280	12	29,562,808	12	32,519,088	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	16,345,600	1	30,812,150	1	8,186,350	1	33,893,365	1	37,282,702	1	41,010,972	1	45,112,069	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	45,268,200	12	93,684,600	12	62,558,425	12	121,968,825	12	134,165,708	12	147,582,278	12	162,340,506	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	7,540,300	1	5,736,825	1	12,836,250	1	12,974,748	1	14,272,222	1	15,699,444	1	17,269,389	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	%	100	-	100	13,561,450	100	10,784,900	100	55,000,000	100	60,500,000	100	66,550,000	100	73,205,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	1	7,407,750	1	5,854,900	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	1	36,602,500	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	1	6,153,700	1	4,930,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	1	36,602,500	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%	100	981,004,675	100	491,211,235	100	467,262,500	100	542,928,111	100	1,221,871,066	100	1,174,937,215	100	1,712,703,670	
Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	892,440,000	2	307,700,000	2	144,295,000	2	338,470,000	2	996,967,144	2	927,542,901	2	1,440,569,924	
Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	88,564,675	1	22,640,225	1	29,167,500	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000	1	36,602,500	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	-	1	60,871,010	1	193,800,000	1	66,958,111	1	73,653,922	1	81,019,314	1	89,121,246	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	10	100,000,000	10	100,000,000	10	110,000,000	10	121,000,000	10	133,100,000	10	146,410,000	

RENSTRA 2025 – 2029 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%	100	2,464,938,365	100	1,710,162,400	100	1,592,531,005	100	2,005,904,715	100	2,206,495,187	100	2,427,144,705	100	4,082,735,394	
Penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	9,614,000	2	7,410,000	2	2,225,250	2	11,000,000	2	12,100,000	2	13,310,000	2	14,641,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	126,421,190	5	193,030,650	5	111,753,850	5	244,904,715	5	269,395,187	5	296,334,705	5	325,968,176	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	1,136,428,564	3	1,089,538,750	3	1,147,768,600	3	1,100,000,000	3	1,210,000,000	3	1,331,000,000	3	2,464,100,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	1,192,474,611	100	420,183,000	100	330,783,305	100	550,000,000	100	605,000,000	100	665,500,000	100	744,926,219	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	100,000,000	1	110,000,000	1	121,000,000	1	533,100,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	100	4,426,523,000	100	0	100	250,651,975	100	592,686,706	100	828,093,942	100	1,231,000,000	100	3,584,846,011	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	12	2,774,543,000	-	-	8	135,328,775	8	202,516,742	8	605,000,000	8	565,500,000	8	1,852,796,011	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	1,651,980,000	47	-	47	115,323,200	47	390,169,964	47	223,093,942	47	665,500,000	47	1,732,050,000	
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	19,440,509,019	100	20,424,186,520	100	19,381,589,550	100	22,466,605,172	100	24,713,265,689	100	26,565,529,303	100	29,903,051,484	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	281,480,268	12	373,558,800	12	336,002,400	12	410,914,680	12	452,006,148	12	497,206,763	12	546,927,439	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	19,159,028,751	5	20,050,627,720	5	19,045,587,150	5	22,055,690,492	5	24,261,259,541	5	26,068,322,540	5	29,356,124,045	
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	100	997,979,555	100	1,015,969,000	100	1,023,260,000	100	1,117,565,900	100	1,229,322,490	100	1,352,254,739	100	1,487,480,213	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	52	47,037,700	56	89,000,000	56	88,500,000	56	97,900,000	56	107,690,000	56	118,459,000	56	130,304,900	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	52	589,801,250	56	637,605,000	56	642,630,000	56	701,365,500	56	771,502,050	56	848,652,255	56	933,517,481	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	104,540,000	30	69,000,000	30	74,130,000	30	75,900,000	30	83,490,000	30	91,839,000	30	101,022,900	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	256,600,605	1	220,364,000	1	218,000,000	1	242,400,400	1	266,640,440	1	293,304,484	1	322,634,932	

RENSTRA 2025 – 2029 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET	
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				18,016,972,259		8,489,101,383		4,311,107,923		11,030,473,536		12,330,737,811		13,435,961,430		15,054,708,707		
Kualitas penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku	Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan	%	100		100		100		100		100		100		100		100	
Tercapainya kapasitas anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas	%	100		100		100		100		100		100		100		100	
Tercapainya kapasitas anggota Satpol PP	Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP	%	100		100		100		100		100		100		100		100	
Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terselesaikannya penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku	Kegiatan	10000	16,778,930,187	1114	6,915,317,740	1114	3,689,558,061	1114	9,315,497,330	1114	10,444,263,984	1114	11,360,840,221	1114	12,772,075,377		
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2,816,901,624	2	245,669,741	2	196,731,050	2	590,411,466	2	649,452,612	2	714,397,872	2	785,837,661		
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	1,510,445,180	2	494,238,825	2	211,192,000	2	723,160,295	2	795,476,325	2	875,023,957	2	962,526,353		
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	563	1,755,081,320	563	387,902,175	521	333,623,750	521	440,000,000	521	484,000,000	521	532,400,000	521	585,640,000		
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	12	626,119,493	12	638,405,873	12	135,129,675	12	702,246,460	12	772,471,106	12	849,718,217	12	934,690,039		

RENSTRA 2025 – 2029 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	12	4,331,477,870	12	3,795,654,301	12	1.552.903.075	12	5.163.153.215	12	5.679.468.537	12	6.247.415.390	12	6.872.156.929	
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	12	5,738,904,700	12	1,353,446,825	12	1,038,397,784	12	1,282,031,655	12	1,380,114,179	12	1,269,206,389	12	1,383,651,071	
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kualitas penanganan penegakan perda dan perkada sesuai SOP yang berlaku	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100	1,238,042,072	100	1,573,783,643	100	1,196,617,924	100	1,777,029,542	100	2,164,938,699	100	2,442,902,078	100	2,719,560,282	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	2	289,168,700	2	385,773,240	2	-		-							
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	478,941,920	12	450,702,387	12	539,025,293	12	685,781,056	12	859,462,264	12	976,143,245	12	1,089,941,567	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	469,931,452	12	737,308,016	12	657,592,631	12	1,091,248,486	12	1,305,476,435	12	1,466,758,833	12	1,629,618,715	

Dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan dan melaksanakan beberapa sub kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sub Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3

**SUB KEGIATAN PRIORITAS YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025-2029**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KE TERANGAN
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kualitas penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Program, kegiatan, dan Sub kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah adalah Program utama yang tercantum dalam SIPD, yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diampu oleh seluruh Bidang di Satpol PP
		'Tercapainya kapasitas anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/ SDM)	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
		Kualitas penanganan penegakan perda dan perkara sesuai SOP yang berlaku	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
		Tercapainya kapasitas anggota Satpol PP	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja

Ukuran keberhasilan Perangkat Daerah tercermin dari pencapaian kinerja yang diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Secara definisi, indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja yang memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan tolok ukur penilaian keberhasilan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Pencapaian IKU perangkat daerah secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian IKU Daerah. Selengkapnya penjabaran penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Satpol PP Kabupaten Bogor yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 pada tabel 4.4 dan tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.4

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	TUJUAN							
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (sub urusan trantibum dan linmas)	Poin	75	76	77	78	79	80
	SASARAN							
2	Indeks Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Poin	75	76	77	78	79	80

Tabel 4.5

INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum								Indikator Kinerja Kunci Satpol PP adalah indikator Program utama, yaitu Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Linmas	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pemberdayaan Anggota Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	100	
	INDIKATOR SPM TRANTIBUM								Indikator Standar Pelayanan Minimal urusan Trantibum
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Orang	5000	5500	6000	6500	7000	7500	
2	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Unit	148	149	151	152	153	158	
3	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	Dokumen	35	35	35	35	35	35	
4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang	455	505	555	605	655	705	
5	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	2	5	5	5	5	5	
7	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	1	5	5	5	5	5	

BAB V PENUTUP

Demikian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja selama lima tahun ke depan, terhitung mulai tahun 2025-2030 sebagai implementasi kewenangan bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.



KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET.	FORMULASI TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
PROGRAM 2										
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah									
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	Penilaian terhadap predikat SAKIP perangkat daerah yang dikeluarkan oleh inspetorat		BB	BB	BB	BB	BB	BB
KINERJA KEGIATAN										
KEGIATAN 1										
Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terselesainya penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku	Kegiatan	Jumlah target kegiatan penanganan pelanggaran gangguan trantibum ----- x 100 jumlah seluruh kegiatan penanganan gangguan trantibum		2000 / 2000 x 100 = 100%	2100 / 2100 x 100 = 100%	2200 / 2200 x 100 = 100%	2300 / 2300 x 100 = 100%	2400 / 2400 x 100 = 100%	2500 / 2500 x 100 = 100%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kualitas penanganan penegakan perda dan perkara sesuai SOP yang berlaku	Persentase	Jumlah pelanggaran perda dan perkara yang ditangani ----- x 100 jumlah pelanggaran perda dan perkara yang dilaporkan dan teridentifikasi		1500 / 1500 x 100 = 100%	1600 / 1600 x 100 = 100%	1700 / 1700 x 100 = 100%	1800 / 1800 x 100 = 100%	1900 / 1900 x 100 = 100%	2000 / 2000 x 100 = 100%

KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET.	FORMULASI TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
KINERJA SUB KEGIATAN										
SUB KEGIATAN 1										
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen			2	2	2	2	2	2
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen			2	2	2	2	2	2
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang			520	520	520	520	520	520
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan			12	12	12	12	12	12
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan			12	12	12	12	12	12
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan			12	12	12	12	12	12

KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET.	FORMULASI TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan			2	2			2	2
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan			12	12			12	12
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan			12	12	12	12	12	12
SUB KEGIATAN 2										
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			4	4	4	4	4	4
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen			1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen			1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen			2	2	2	2	2	2
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen			2	2	2	2	2	2
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			1	1	1	1	1	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			1	1	1	1	1	1
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen			1	1	1	1	1	1

KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET.	FORMULASI TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan			139	139	139	139	139	139
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen			12	12	12	12	12	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			12	12	12	12	12	12
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen			1	1	1	1	1	1
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			1	1	1	1	1	1
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			1	1	1	1	1	1
Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket			1	1	1	1	1	1
Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen			1	1	1	1	1	1
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen			1	1	1	1	1	1
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			10	10	10	10	10	10

KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KET.	FORMULASI TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			2	2	2	2	2	2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			5	5	5	5	5	5
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			3	3	3	3	3	3
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			2	2	2	2	2	2
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			100	100	100	100	100	100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			1	1	1	1	1	1
Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			12	12	12	12	12	12
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			18	18	18	18	18	18
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	12	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			5	5	5	5	5	5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			52	52	52	52	52	56
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			52	52	52	52	52	52
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			25	25	25	25	25	25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	1	1	1	1	1



SATPOLPP
.BOGORKAB.GO.ID



SATPOLPP.KABBOGOR



SATPOL PP
KABUPATEN BOGOR



@SATPOLPPKABBOGOR



SIAGA 112